

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 6 September 2018
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas penyampaian Pagu Anggaran dan RKA K/L TA 2019
Ketua Rapat	: Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Isnu Purwanto, S.IP, MM/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 dari 45 Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP agenda membahas penyampaian Pagu Anggaran dan RKA K/L TA 2019, pada hari Kamis, 6 September 2018, dibuka pada pukul 13.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI mendapatkan penjelasan terkait Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp. 3.172.970.626.000,- (tiga triliun seratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)** yang akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program-program sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Rp. 439.316.444.000,-
- b. Program Pengawasan Internal Kemendagri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Rp. 73.785.352.000,-
- c. Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : Rp. 237.329.445.000,-
- d. Program Bina Administrasi Kewilayahan : Rp. 140.323.540.000,-
- e. Program Bina Otonomi Daerah : Rp. 86.903.286.000,-
- f. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah : Rp. 75.139.543.000,-
- g. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Rp. 811.277.593.000,-
- h. Program Bina Pembangunan Daerah : Rp. 237.309.528.000,-
- i. Program Bina Pemerintahan Desa : Rp. 227.651.971.000,-
- j. Program Penelitian dan Pengembangan : Rp. 44.363.879.000,-
- k. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri : Rp. 198.346.269.000,-
- l. Program Pendidikan Kepamongprajaan : Rp. 601.223.776.000,-

Terhadap pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2019 tersebut, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara lebih mendalam pada rapat-rapat selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan RAPBN Tahun 2019.

2. Komisi II DPR RI mendapatkan penjelasan terkait penyampaian Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar **Rp. 193.968.340.000,- (seratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** yang akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program-program sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Rp. 133.608.340.000,-
- b. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. : Rp. 60.360.000.000,-

3. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp.1.277.686.119.000,-** dan BNPP sebesar **Rp.30.000.000.000,-**. Komisi II DPR RI akan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran tersebut di atas dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB.

Jakarta, 6 September 2018
KETUA RAPAT

ttd

DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI
A-419